



KETERLIBATAN TOKOH LOKAL DALAM FIKIH SDGS (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS) DI KABUPATEN JEMBER

Faiqoh Nurul Hikmah^{*1}, Wiwik Fitria Ningsih²

^{1*} Ilmu Administrasi Negara, Universitas Moch. Sroedji Jember, Indonesia

² Ilmu Akuntansi, Institut Teknologi dan Sains Mandala, Indonesia

e-mail: ¹faiqoh@umsj.ac.id , ²wiwik@itsm.ac.id .

ABSTRACT

In 2015, the United Nations (UN) launched the Sustainable Development Goals (SDGs) program to become a global norm. The presence of SDGs as a global norm is then socialized and diffused to all countries in the world. At the national level, so far the process of accepting, socializing and institutionalizing the SDGs has centered on the role of the government. Not much attention has been focused on how community involvement in the process of norm diffusion to the community. It is also important to know why interpretations or changes to SDGs norms are needed. This paper looks at how the socialization of SDGs norms requires adjustments to the local values embraced by the community. Using Acharya and qualitative methods, this explorative paper finds that the socialization of SDGs requires a legitimization process through religious values. Furthermore, the legitimization of socialization through the creation of SDGs fiqh so that people can engage and accept global norms more naturally. In religious communities, the dissemination process occurs through indiginization involving community leaders (kyai or local actors) and NGO figures. And the proof that this involvement is with the establishment of SDGs village as a sign of acceptance of this norm although it requires adaptation and modification but in the end it gets a more meaningful place in society.

Keywords: *Community Involvement, SDGs, fiqh, Jember district*

ABSTRAK

Pada 2015, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mencanangkan program Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi suatu norma global. Kehadiran SDGs sebagai norma global kemudian disosialisasikan dan didifusikan ke seluruh negara di dunia. Di tingkat nasional, selama ini proses penerimaan, sosialisasi, dan pelebagaan SDGs banyak berpusat pada peran pemerintah. Belum banyak perhatian yang dipusatkan pada bagaimana keterlibatan komunitas melakukan proses difusi norma ke masyarakat. Selain itu juga penting mengetahui mengapa diperlukan penafsiran atau perubahan pada norma-norma SDGs. Paper ini melihat bagaimana sosialisasi norma SDGs membutuhkan penyesuaian dengan nilai lokal yang dianut oleh

masyarakat. Dengan menggunakan Acharya dan metode kualitatif, eksploratif paper ini menemukan bahwa sosialisasi SDGs membutuhkan proses legitimasi melalui nilai-nilai agama. Lebih jauh, legitimasi sosialisasi melalui pembuatan fiqih SDGs agar masyarakat lebih engage dan menerima norma global secara lebih natural. Di masyarakat yang religius proses penyebaran itu terjadi melalui indiginisasi yang melibatkan tokoh masyarakat (kyai atau aktor lokal) tokoh-tokoh NGO. Dan bukti bahwa keterlibatan ini dengan dibentuknya Fikih SDGs sebagai tanda diterimanya norma ini meskipun membutuhkan adaptasi dan modifikasi tapi pada akhirnya mendapat tempat yang lebih bermakna di masyarakat..

Kata Kunci: Keterlibatan Masyarakat, SDGs, Fiqih, Kabupaten Jember

PENDAHULUAN

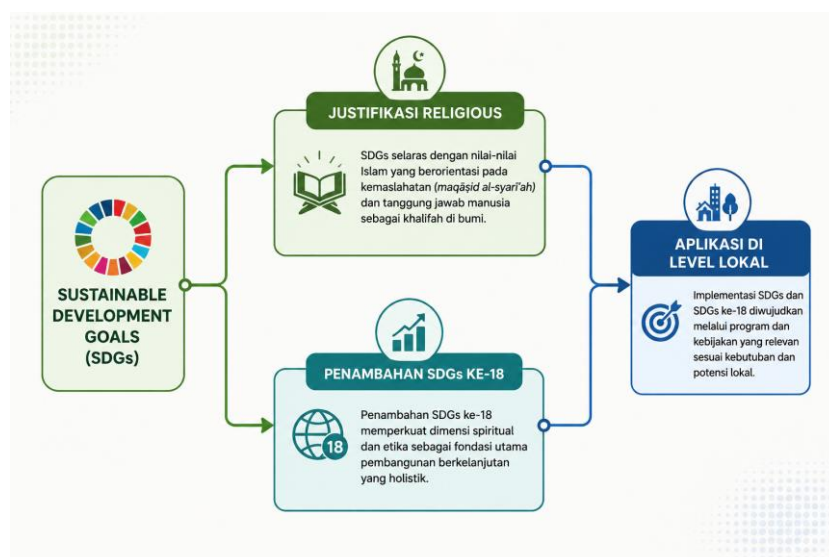
Global Urbanization adalah kebijakan pembangunan global. Hal ini merefleksikan nilai SDGs dengan tujuan SDGs ke sebelas, New Urban agenda berhubungan dengan pembangunan yang diadopsi oleh pemerintah, dan dalam paduan suara yang terus berkembang. Perubahan iklim juga penting dalam tantangan pembangunan berkelanjutan (Barber, 2013; Acuto, 2016; Parnell, 2016). Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mengklaim bahwa “105 dari 169 target di balik 17 SDGs tidak akan tercapai keterlibatan dan koordinasi yang tepat dengan pemerintah lokal dan regional” (OECD, 2020). Oleh sebab itu keterlebitan dan koordinasi dengan pemerintah lokal dan regional menjadi penting untuk dilaksanakan.

Nilai SDGs sebagai norma global membutuhkan bridging agar bisa diterima oleh masyarakat lokal. Oleh karenanya keterlibatan dan koordinasi dengan pemerintah lokal dan regional menjadi penting untuk dilaksanakan. Norma global ini akan bisa diterima oleh masyarakat menjadi norma lokal jika ada bridging. Maka dibutuhkan tokoh lokal yang bisa menjembatani dan mengkomunikasikan hal ini dengan baik agar tidak ada kecurigaan dalam penerapannya. Penyebaran norma lokal (diffusion of Norm) dalam SDGs dilakukan oleh peran aktor (Bacon et al., 2023). Penyebaran norma berbasis aktor lokal diperlukan upaya dari komunitas internasional untuk memahami dinamika aktor domestik (lokal) yang terlibat dalam penyebaran norma ini. Penelitian ini akan meneliti lebih jauh dan mempertimbangkan potensi aktor lokal di tingkat masyarakat lokal dalam mempengaruhi keputusan penerapan norma global SDGs ke dalam norma lokal di dalam masyarakat dan bagaimana dapat bertahan dan bisa diterima di tingkat masyarakat lokal tersebut.

Sebagaimana penelitian di atas, penelitian sebelumnya tentang norma-norma internasional mengembangkan rumusan teoritis dan menghasilkan temuan empiris yang membantu kita memahami proses penerapan norma. Konstruksi, difusi, dan internalisasi, namun memandang norma-norma itu sendiri tidak akan berubah setelah dilembagakan dalam hukum internasional

atau dalam instrument tata kelola dan pemerintahan global. Diinternalisasikan oleh aktor-aktor negara, dengan kata lain, banyak peneliti norma konstruktivis yang meneliti hal ini norma-norma sebagai entitas tetap yang ada secara independen dari para aktor dan penafsirannya. Dan mempelajari norma sebagai sesuatu yang stabil dan terisolasi, yang keberadaannya dianggap remeh yang isinya tetap dan tegas (Shawki, 2016) . Maka penyebaran norma SDGs sebagai norma global bisa masuk dan lebih mudah diterima oleh masyarakat lokal..

Berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya, paper ini beranggapan bahwan penyebaran norma sdgs membutuhkan interpretasi norma religious lokal untuk memperkuat norma global. Paper ini membahas bagaimana masyarakat Indonesia melokalisasikan dan meng-indigenousasi norma SDGs ke masyarakat lokal. Masyarakat lokal acap kali sudah mempunyai pemahaman atau interpretasi sendiri tentang pembangunan berkelanjutan atau bahkan sebagian masyarakat belum menangkap sepenuhnya beberapa istilah norma SDGs. Kami menggunakan kasus bagaimana masyarakat di Kabupaten Jember melakukan proses lokalisasi dan indigenisasi norma SDGs tersebut (Shayan et al., 2022). Hal ini dikarenakan masyarakat Jawa Timur dalam taraf tertentu dianggap religius sehingga dipandang mempunyai konsepsi awal tentang pembangunan berkelanjutan. Sebaliknya, masyarakat Jawa Timur tidak terlalu familiar dengan konsep-konsep global SDGs. Lokalisasi yang melibatkan konsepsi religius menjadi tak terhindarkan.



Secara teoritik penambahan ini dikenal sebagai proses lokalisasi norma. Lokalisasi norma SDGs di tingkat desa di Indonesia menunjukkan bahwa norma global mengalami proses perubahan dan pemaknaan kembali di level masyarakat (Masuda et al., 2022). Artinya penerimaan masyarakat terhadap norma global tidak bisa berlangsung secara apa adanya. Sebuah modifikasi secara faktual dibutuhkan. Temuan tentang adanya modifikasi norma global ke dalam SDGs di masyarakat ini dapat memperluas wawasan

sekaligus memberikan kontribusi pada teori difusi norma. Proses internalisasi norma yang telah terinstitusionalisasi mengalami penafsiran dan pemaknaan ulang pada level masyarakat (Keck & Sikkink, 2019) Cara ini tampaknya agar masyarakat lebih nyaman menerima norma global tersebut. Singkatnya penafsiran dan pemaknaan di level masyarakat adalah sesuatu yang tidak dapat dihindarkan agar implementasi norma global dapat terlaksana.

Seperti penjelasan di atas paper ini menemukan bahwa aktor-aktor yang menyebarkan norma tidak hanya berasal dari negara tetapi juga melibatkan aktor-aktor keagamaan. Selanjutnya, ditemukan bahwa masyarakat yang religius memiliki nilai-nilai agama yang kuat dengan masuknya SDGs, masyarakat religius membutuhkan instrumen yang membantu (Fauzan, 2022) . Instrumen yang dimaksud adalah nilai-nilai fiqih yang mengindigenisasi norma SDGs. Maka dari itu, masyarakat dapat memahami norma SDGs secara komprehensif. Dalam konteks Indonesia, khususnya di Jawa Timur, aplikasi SDGs memiliki aspek yang unik. Paling tidak ada dua aspek penting yang menonjol. Pertama, justifikasi religius dalam menafsirkan SDGs dan yang kedua adalah penambahan elemen SDGs dari 17 program menjadi 18 program. Meski tidak ada penolakan yang nyata terhadap SDGs, masyarakat Jawa Timur yang dikenal cukup religius, memerlukan sebuah justifikasi keagamaan dalam proses penerimaan SDGs sebagai norma. Secara khusus 17 program SDGs yang umumnya dianggap sudah komprehensif, ketika sampai kepada masyarakat point-point ini justru mengalami modifikasi. Hal ini ditandai dengan kemunculan dan penambahan satu poin baru (yang kemudian dikenal sebagai poin ke-18) yang kemudian dikenal sebagai “SDGs Desa” (Madjid, 2020). SDGs Desa merupakan poin tambahan yang dibuat oleh Kementerian Desa. Singkatnya terdapat modifikasi atau penyesuaian dalam implementasi SDGs di masyarakat desa di Indonesia.

Pada kenyataannya, norma SDGs tidak ditolak oleh masyarakat lokal namun memerlukan proses lokalisasi dengan adaptasi dan modifikasi yang rumit. Penerimaan norma SDGs di masyarakat lokal mengalami proses lokalisasi dengan adaptasi dan modifikasi yang rumit (Fauzan, 2022). Kajian terhadap penerimaan norma SDGs terhadap masyarakat lokal dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis tentang penyebaran norma global.

Dalam hal ini masyarakat religius melakukan proses indigenisasi untuk menjadikan norma global itu sebagai bagian dari milik mereka. Dan mereka juga melakukan proses lokalisasi dengan menerjemahkan dan mengadaptasi norma global itu ke dalam konteks lokal. Pada akhirnya, Norma SDGs dapat diterima oleh masyarakat dan memberikan kontribusi teoritis dan praktis tentang penyebaran norma global meskipun memerlukan adaptasi dan modifikasi agar lebih mudah diterima dan diwujudkan.

Berbagai kajian juga sudah dilakukan untuk melihat adaptasi dan pemajuan SDGs di Indonesia. Misalnya penelitian yang ditulis oleh Nino Viartasiwi “*Melokalkan Agenda Global: Peran Aktor di Daerah Dalam Adaptasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia*”. Penelitian tersebut membahas peran pemerintah daerah dalam menerjemahkan agenda pembangunan di tingkat daerah (2022). Lalu, penelitian berjudul “*Green Village Pertamina Integrated Terminal Surabaya: Strategy of Corporate Social Responsibility (CSR) Towards the Sustainable development Goals (SDGs)*”, mengeksplorasi strategi CSR Pertamina Integrated Terminal Surabaya yang selaras dengan SDGs (Aulia Ulfah Farahdiba, dkk., 2020). Selanjutnya, tulisan “*Universities in Global Development Framework: Optimization of Community Engagement for Youth Capacity Building*” mengkaji peran penting universitas dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan daya saing generasi muda dalam konteks SDGs (Heryadi & Dewi, 2018).

Sedangkan penelitian yang ditulis oleh Febriyanti *Implementasi SDGs Pada Program Kerja Desa Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi di Era Kenormalan Baru Melalui Pendampingan Perencanaan Pembangunan Desa Deme 2 Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara* membahas tentang fokus kepada penyusunan dan program kreatif dalam pencapaian SDGs Desa (2024). Program ini dilakukan oleh pemerintah Desa dan mahasiswa KKN melalui pemberdayaan masyarakat. Di samping itu, penelitian dari Rahmat, dkk mengenai *Impelemtasi SDGs, goal 8 pada pelaku Usaha Mikro di Desa Padas Kecamatan Rangnom dan Desa Bonyokan kecamatan Jatimuom Kabupaten Klaten* mengkaji tingkat pemahaman pemangku desa dan pelaku swasta dalam Usaha Mikro dalam mewujudkan target kriteria nomor kedelapan pada Goal SDGs yaitu pembangunan ekonomi

(2023). Secara ringkas, penelitian sebelumnya berfokus pada peran pemerintah, Peran swasta dalam kebutuhan komunitas, peran Universitas dan mahasiswa dalam mempromosikan nilai SDGs dan menerapkannya dalam KKN (Kuliah Kerja Nyata), penyusunan program kreatif bagi pelaku usaha *Small Medium Enterprise* dalam target nomor ke delapan SDGs. Namun di antaranya semua jurnal terdahulu ini, tidak ada yang membahas peran aktor (tokoh) keagamaan dalam menyebarkan nilai dan menerapkan nilai SDGs dalam kehidupan sehari-hari dalam melibatkan masyarakat utamanya di desa yang masuk dalam Kabupate Jember.

Secara teoritis fenomena masuknya norma SDGs ke dalam masyarakat lokal merupakan contoh yang hampir sempurna tentang bagaimana proses difusi norma internasional diterima di berbagai tempat. Dalam konsep Sikkink misalnya, kita dapat mengatakan bahwa norma internasional seperti SDGs mengalami proses difusi sesuai siklus sampai pada tahap internalisasi nilai-nilai (Finnemore & Sikkink, 1998). Namun penerimaan terhadap norma SDGs tidak sepenuhnya berjalan mulus Ketika norma itu sampai kepada target terakhir di Masyarakat. Masyarakat memiliki nilai-nilai dan kebiasaan lokal yang sudah ada sebelumnya. Terdapat proses penerimaan dan adaptasi serta modifikasi yang kompleks ketika nilai-nilai SDGs sampai ke Masyarakat. Terutama di negara yang penduduknya dikenal religius di Indonesia, peranan kelompok agamawan untuk menebar prinsip-prinsip SDGs sangat penting. Karena itu lah, paper ini berupaya menggali lebih dalam tentang bagaimana komunitas keagamaan melakukan proses lokalisasi norma ini. Pada Masyarakat ini, SDGs memerlukan berbagai justifikasi keagamaan agar dapat menjadi bagian internal di masyarakat secara lebih kuat. Dalam proses lokalisasi ini, komunitas NU memainkan peran penting bagi perluasan agenda SDG yang dirasakan lebih dekat dengan keperluan Masyarakat.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, artikel ini berfokus pada keterlibatan komunitas dalam menumbuhkan kesadaran dan penerimaan masyarakat terhadap SDGs. Dengan mengambil kasus pada kegiatan Organisasi Keagamaan Nahdlatul Ulama (NU). Tujuan penelitian tersebut yaitu mengeksplorasi strategi, pendekatan, dan mekanisme yang dilakukan NU dalam memajukan SDGs di tingkat desa. Peran utama NU yakni melakukan

justifikasi keagamaan dalam proses penerimaan norma SDGs di masyarakat kajian ini juga menganalisis penerimaan dan penerapan SDG (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2017). Kementerian ini juga membuat laporan berkala tentang kemajuan pelaksanaan SDGs.

METODE

Dalam penelitian ini, penulis memilih metode kualitatif. Metode yang penulis pilih dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Penelitian kualitatif analitik dimulai dengan kemungkinan penggunaan hipotesis, contoh, dan perspektif teoretis, serta studi tentang masalah penelitian individu dan kelompok yang berkaitan dengan masalah sosial atau manusia. Pendekatan ini digunakan penulis dalam menganalisis data-data yang telah dikumpulkan secara rinci dalam melakukan penelitiannya (Creswell, 2018). Alur penelitian yang digunakan oleh penulis adalah alur deduktif dalam pembentukan alur logikanya. Hal ini didasari oleh pembahasan yang bersifat umum dan menuju ke arah yang khusus.

Dalam hal ini, peneliti menggunakan alur deduktif yang sejalan dengan konsep Sustainable Development Goals (SDGs) dan konsep norma internasional. Kedua konsep ini saling berhubungan dan dipengaruhi oleh hal yang bersifat luas dan umum mengenai proses internalisasi Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai norma internasional dalam sebuah negara. Dalam proses pengumpulan data, penulis menghimpun data-data yang berkaitan SDGs secara global, perkembangan SDGs di Indonesia, dan norma internasional. Dalam hal ini, salah satu proses terbentuknya norma internasional adalah internalisasi. Data yang berkaitan dengan hal tersebut berbentuk dokumen atau publikasi dan data lainnya yang akan menggambarkan kenyataan dengan situasi berdasarkan konsep yang digunakan, yaitu SDGs dan norma internasional. Pada penelitian kualitatif, logika berpikir dibentuk secara terstruktur dan mengikuti alur penelitian.

Sumber data yang diperoleh peneliti adalah data pendukung yaitu data yang sudah ada dan diperoleh dari pihak kedua. Sumber data berasal dari penelitian literatur dan laporan resmi Sekretariat SDGs, BAPPENAS dan Badan Pusat Statistik (BPS). Selain itu untuk memberikan informasi yang kuat pada data penelitian, Peneliti juga mengumpulkan data dari buku, jurnal, hasil penelitian sebelumnya, dan dokumen yang tersedia di situs resmi Bappenas (2017 dan 2020), yang berkaitan dengan fokus utama penelitian dan pencarian data yang tersedia di Internet. selain itu juga, wawancara di lapangan.

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah teknik analisis data yang dikemukakan oleh Creswell, yaitu dengan menganalisis penelitian dari

pengumpulan data dan interpretasi data, kemudian menghubungkan atau menggabungkannya dengan teori-teori yang ada, dan akhirnya menarik kesimpulan (Cresswell, 2007). Setelah itu, penelitian ini akan berakhir pada simpulan yang berasal dari data-data mengenai fokus penelitian yang kemudian digunakan sebagai penguat argumen sehingga dapat dilakukan interpretasi data kemudian dapat mencapai sebuah hasil simpulan yang sesuai dengan data yang telah didapatkan dengan mengaitkannya pada teori yang sesuai. Analisis yang ditawarkan dalam penelitian kualitatif-deskriptif adalah mendeskripsikan fenomena-fenomena yang sedang teliti. Hal ini akan membawa kepada hasil kesimpulan yang berisi mengenai kejadian-kejadian yang sebenarnya, aktor yang terlibat, dan inti permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari adanya permasalahan di atas kami mencoba memformulasikan terminologi baru ke dalam masyarakat agar mudah diterima dan ditaati untuk dilaksanakan dengan baik muncullah istilah Fikih SDGs dalam mendesain infrastruktur (konservasi hutan, berhemat dalam penggunaan air), dalam distribusi pangan (tunaikanlah zakat dan perbanyaklah sedekah agar dapat mengatasi masalah kemiskinan), efisiensi transportasi (tidak terlalu polusi dan padat kendaraan di jalan serta tidak boros dalam penggunaan BBM dan lebih mengarah ke transportasi publik).

Bagi umat muslim, upaya untuk mempertahankan keseimbangan (*mizan*) yang dianugerahkan Allah dalam penciptaan semesta alam bahwa manusia sebagai *khalifah* harus bisa memastikan anugerah alam bisa diakses secara merata, tidak hanya oleh generasi saat ini tetapi juga untuk generasi mendatang. Konsep *khalifah* adalah nilai inti dari prinsip *sustainability* (keberlanjutan) dalam membangun peradaban di muka bumi. Meski terdapat problematika yang memerlukan penyelesaian tak terkecuali dari perspektif keagamaan, untuk itulah Islam mensyariatkan *ijtihad*, yakni Upaya keras untuk mencapai tujuan. Tujuan yang dimaksud ialah kemaslahatan (Asyur, 1984 dan 2011). Konsep kemaslahatan yang ingin diwujudkan Islam tidak hanya manusia tetapi seluruh makhluk (*mashalih al-ibad*). Tidak hanya kemaslahatan saat ini (*maslahah duniawiyah*), tetapi juga kemaslahatan masa mendatang (*maslahah ukhrawiyah*).

Kampung SDGs di desa Sukorejo ini diresmikan menjadi PPKSI (Pusat Pengembangan Kampung SDGs Indonesia) dan menyebar ke dua puluh kampung SDGs lainnya di kabupaten Jember. Adapun diantaranya 20 kampung tersebut adalah Jika ada bantuan beras dari Gubernur Khofifah dengan container beras yang banyak, kami bagikan kepada seluruh warga disini agar tepat sasaran (hasil wawancara dari narasumber Kyai Misbah ketua Pembina PPKSI). Kampung SDG's (Sustainable Development Goals) merupakan satuan wilayah setingkat

desa yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program Sustainable Development Goals yang dilakukan secara komprehensif dan sistematis. Kampung SDG's nantinya menjadi salah satu bentuk atau model miniatur pelaksanaan program SDGs secara Regional maupun nasional (Hasil Wawancara Kyai Misbah anggota PBNU dan Pendiri Kampung SDGs).

Dalam upaya mencapai SDGs peran utama fikih SDGs adalah untuk memberikan legitimasi keagamaan terhadap setiap tujuan SDGs. Hal ini menjadi penting karena untuk memberikan otoritas keagamaan khususnya bagi umat muslim untuk turut berkontribusi dalam pencapaian SDGs. Bahwa mengupayakan pencapaian tujuan SDGs adalah upaya mewujudkan *maqashid as-syari'ah* (Fauzan, 2022).

Selain sebagai legitimasi, keberadaan fikih juga berperan untuk memberikan formulasi konkret pandangan keislaman yakni fikih harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti diantaranya: apa langkah-langkah konkret yang disarankan Islam untuk mewujudkan kesetaraan gender, Apa solusi Islam untuk mengupayakan terwujudnya energi terbarukan, Apa solusi Islam untuk mengurangi ketimpangan antar negara. Untuk memberikan legitimasi dan merumuskan formulasi keislaman tersebut, diperlukan pemahaman holistic terhadap sumber-sumber keislaman, yaitu al-quran, hadis, serta *turats* ulama dengan *pendekatan normative (tekstual) seklaigus historis (kontekstual)*. Keduanya diperlukan untuk menyerap nilai-nilai keislaman dari sumber-sumber tekstualnya berikut solusi konkret yang ditawarkan Islam dari pengalaman historis umat muslim. Dengan pendekatan ini, fikih terbuka untuk menerima masukan dari ilmu pengetahuan yang lain guna merumuskan 'solusi keislaman'. Hal ini berangkat dari karakteristik fikih itu sendiri yang merupakan dialektika antara teks dan realitas, nalar dan wahyu.

Faktor-faktor yang mendukung pelokalan norma SDGs ialah Pertama, lokalisasi mungkin terjadi jika pengambil norma menjadi percaya bahwa norma luar yang baru, yang pada awalnya mungkin ditakuti dan ditentang hanya karena kualitasnya yang asing, dapat digunakan untuk meningkatkan legitimasi dan otoritas lembaga dan praktik mereka yang masih ada, tetapi tanpa secara mendasar mengubah identitas sosial mereka yang sudah ada. Menunjukkan bahwa para aktor meminjam aturan internasional untuk "membenarkan tindakan mereka sendiri dan mempertanyakan legitimasi orang lain". Faktor kedua yang mendukung pelokalan adalah kekuatan norma-norma lokal sebelumnya. Beberapa norma lokal merupakan dasar bagi suatu kelompok. Mereka mungkin berasal dari kepercayaan dan praktik budaya yang tertanam kuat atau dari norma hukum internasional yang pada tahap sebelumnya, telah dipinjam dan diabadikan dalam dokumen konstitusional suatu kelompok. Dalam kedua kasus tersebut, norma-norma telah menjadi bagian integral dari identitas kelompok lokal, dalam arti bahwa "mereka merupakan identitas dan kepentingan aktor dan tidak hanya mengatur perilaku". Semakin kuat norma lokal, semakin besar kemungkinan bahwa norma asing baru akan dilokalkan.

KESIMPULAN

SDGs terbentuk menjadi norma internasional melalui 3 proses, yaitu pengenalan yang dilakukan oleh PBB terlebih dahulu dan tidak hanya negara yang bertugas untuk memperkenalkan kehadiran SDGs namun juga menjadi tugas bagi NGOs (aktor-aktor lokal keagamaan) dan institusi terkait (NU dan Kampung SDGs). proses selanjutnya adalah dilakukannya penyebarluasan SDGs melalui berbagai macam platform yang dapat digunakan, penyebarluasan ini ditujukan untuk menyampaikan informasi ke seluruh dunia untuk turut serta dalam mencapai seluruh tujuan dan target SDGs. Setelah pemahaman mengenai SDGs telah tersampaikan melalui proses lokalisasi terhadap masyarakat lokal, tahapan terakhir adalah proses internalisasi yang dilakukan oleh negara-negara dengan melakukan ratifikasi SDGs menjadi hukum domestik. Sedangkan Proses lokalisasi dilakukan oleh aktor-aktor lokal keagamaan sebagai wujud pencapaian SDGs yang bisa diterima oleh masyarakat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Bacon, P. et all, Chiba, M., & Ponjaert, F. (2023). *Routledge Studies in Sustainable Development* (P. Bacon, M. Chiba, & F. Ponjaert (eds.); Vol. 4, Issue 1).
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran* (Edisi 4). Pustaka Pelajar.
- Finnemore, M., & Sikkink, K. (1998). International Norm Dynamics and Political Change. *International Organization*, 52(4), 887–917. <https://doi.org/10.1162/002081898550789>
- Heryadi, R. D., & Dewi, A. U. (2018). *Universities in Global Development Framework : Optimization of Community Engagement for Youth Capacity Building Universities in Global Development Framework : Optimization of Community Engagement for Youth Capacity Building*. March 2019. <https://doi.org/10.2991/icosop-17.2018.51>.
- Keck, M. E., & Sikkink, K. (2019). Activists beyond Borders. In *Activists beyond Borders*. Cornell University Press. <https://doi.org/10.7591/9780801471292>.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2017). Peta Jalan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. *Kementerian PPN/Bappenas*, 35. https://sdgs.bappenas.go.id/website/wp-content/uploads/2021/02/Roadmap_Bahasa-Indonesia_File-Upload.pdf
- Madjid, T. dkk. (2020). *Peringkat Indeks Desa Membangun*. 871.
- Masuda, H., Kawakubo, S., Okitasari, M., & Morita, K. (2022). Exploring the role of local governments as intermediaries to facilitate partnerships for the Sustainable Development Goals. *Sustainable Cities and Society*, 82(April), 103883. <https://doi.org/10.1016/j.scs.2022.103883>.

- Shawki, N. (2016). *Norms and normative change in world politics : an analysis of land rights and the Sustainable Development Goals*. 1158(August). <https://doi.org/10.1080/14781158.2016.1196659>.
- Shayan, N. F., Mohabbati-Kalejahi, N., Alavi, S., & Zahed, M. A. (2022). Sustainable Development Goals (SDGs) as a Framework for Corporate Social Responsibility (CSR). *Sustainability (Switzerland)*, 14(3), 1–27. <https://doi.org/10.3390/su14031222>.